



Potensi

USAHA MIKRO KECIL

PROVINSI D.I. YOGYAKARTA



<http://www.usakabos.go.id>

Potensi

USAHA MIKRO KECIL

PROVINSI D.I. YOGYAKARTA



**POTENSI USAHA MIKRO KECIL
SENSUS EKONOMI 2016**

No. ISBN: 978-602-1392-74-4
No. Publikasi: 34550.1807
No. Katalog: 9102067.34

Ukuran Buku: 20 cm x 20 cm
Jumlah Halaman: vi + 34 halaman

Naskah: Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Penyunting: Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Desain Kover oleh: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Diterbitkan oleh: © Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta

Tata Letak: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Sumber Ilustrasi: www.freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

<https://yogyakarta.bps.go.id>

Kata Pengantar



P Dalam rangka implementasi Undang-undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan perhelatan pendataan lengkap atau listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016). Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai aktivitas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB), pada tahun 2017 dilakukan pendataan SE2016 Lanjutan.

Hasil pendataan SE2016 Lanjutan dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan perumusan kebijakan di antaranya untuk mengukur kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan memberikan gambaran karakteristik/kualitas sumber daya manusia, kondisi aksesibilitas permodalan, prospek usaha, dan kinerja keuangannya. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah untuk membantu pengembangan UMK baik melalui pembinaan maupun penyusunan regulasi yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK. Dengan demikian, peran UMK dalam kegiatan ekonomi lokal semakin kuat. Lapangan pekerjaan pun makin meningkat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan SE2016-Lanjutan. Semoga informasi penting hasil SE2016-Lanjutan yang disajikan dalam booklet ini memenuhi harapan konsumen data.

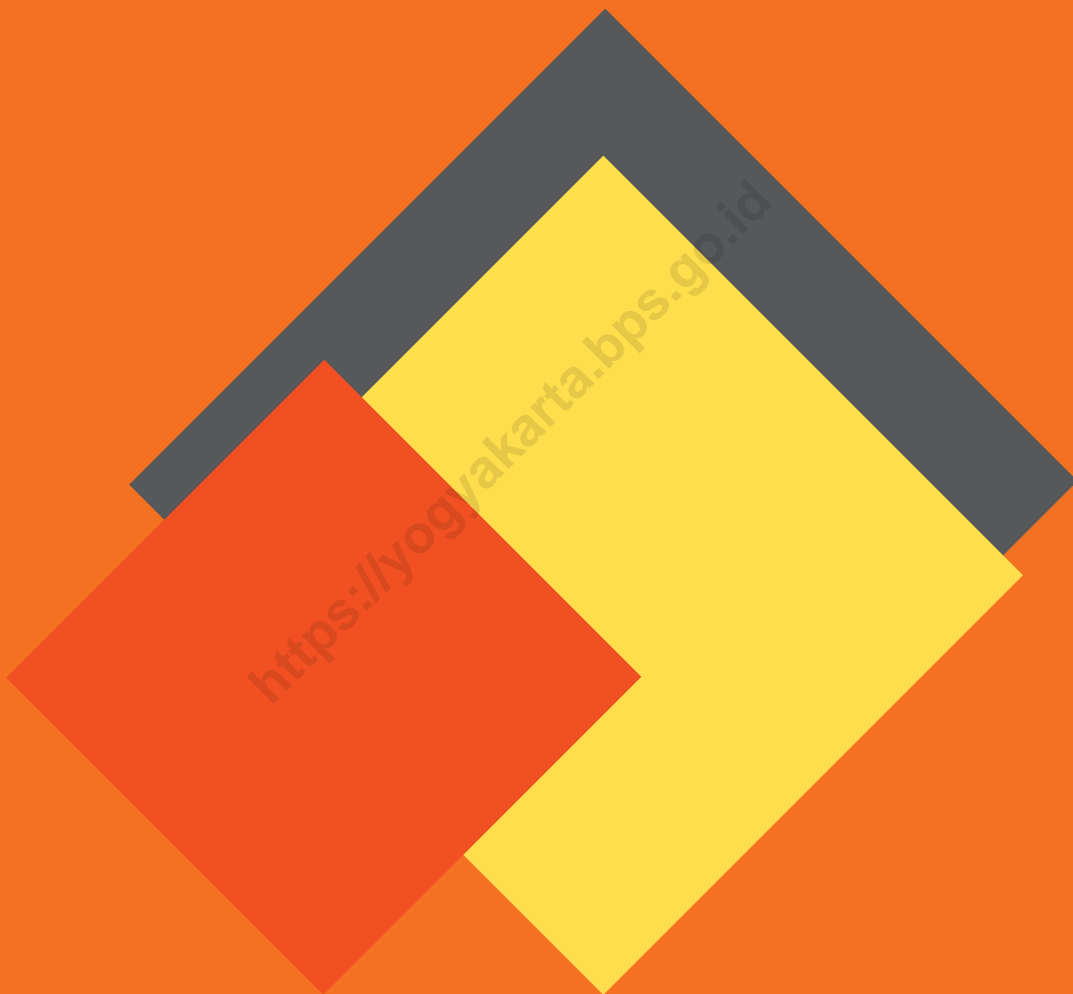
Yogyakarta, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Johanes De Britto Priyono



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
PENDAHULUAN	1
UMK MENDOMINASI JUMLAH USAHA DI D.I. YOGYAKARTA	3
UMK SEBAGAI PENYERAP TENAGA KERJA TERBANYAK	_ 7
PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA	_ 11
PELAKU UMK PERLU MENINGKATKAN KAPABILITAS	____ 17
KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN	_____ 21
PROSPEK UMK DI MASA MENDATANG	_____ 27



Pendahuluan

Dunia usaha di DIY pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil SE2016 Listing, jumlah usaha ini mencapai lebih dari 524,9 ribu usaha atau 98,36 persen dari total usaha nonpertanian di DIY. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja DIY lebih dari 1.044,5 ribu orang atau sekitar 78,98 persen dari total tenaga kerja nonpertanian. Ketika krisis menerpa Indonesia pada sekitar tahun 1997-1998 kondisi UMK di DIY, terbukti tetap berdiri kokoh di saat usaha-usaha besar lainnya terpuruk dalam kebangkrutan.

Keunggulan UMK dalam bertahan dari badai krisis karena berbagai alasan. Pertama, umumnya UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMK tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Ketiga, umumnya bisnis UMK menggunakan modal relatif rendah. Dengan keunggulan tersebut, UMK tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam.

Dibalik beberapa keunggulan tersebut, UMK juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak mampu untuk berkembang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut di antaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah; dikelola dengan cara yang sederhana; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor.

Mengingat pentingnya peran UMK dalam menggerakkan roda perekonomian di DIY, hendaknya kendala dan keterbatasan tersebut tidak menyurutkan pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Peluang untuk mengembangkan bisnis UMK terbuka lebar jika pelaku UMK mampu membaca situasi pasar. UMK mempunyai peran yang penting khususnya pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam maupun padat tenaga kerja.

Sementara itu, untuk melihat potensi dan kinerja UMK saat ini, serta untuk melihat prospeknya di masa mendatang, perlu melakukan analisis kinerja UMK. Hal ini juga bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan melalui pendataan dan identifikasi potensi serta masalah yang dihadapi. Melalui upaya identifikasi kinerja UMK dan permasalahan yang dihadapi, maka akan memberikan rekomendasi yang menjadi bagian pijakan dalam penyusunan regulasi atau kebijakan yang mampu melindungi melindungi dan meningkatkan kinerja UMK sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelakunya.



UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
D.I. YOGYAKARTA

Bagian

1

<https://yogyakarta.bps.go.id>

UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian DIY. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan karena bisa hanya dengan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya. Jenis barang/komoditas bahkan kategori usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. Tempat usahanya juga tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.

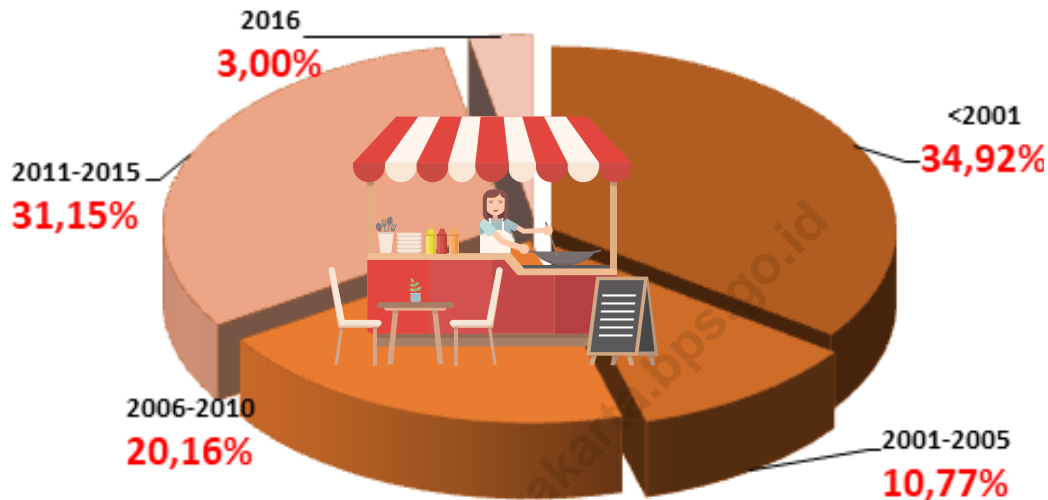
Persentase UMK di DIY mencapai 98,7 persen dari total jumlah usaha nonpertanian di DIY. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori nonpertanian. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan persentase mencapai 35,4 persen. Usaha Industri Pengolahan (Kategori C) mempunyai kontribusi terbesar kedua yaitu sebesar 27,8 persen. Sementara usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) memiliki kontribusi terbesar ketiga, yaitu sebesar 17,7 persen.

Lima kabupaten/kota di DIY masih menjadi

konsentrasi UMK, masing-masing memiliki persentase UMK di atas 97 persen. Secara persentase, jumlah UMK terbanyak di Gunungkidul yaitu 99,7 persen dari total usaha nonpertanian, sedangkan terendah di Kota Yogyakarta dengan jumlah UMK sebesar 97,2 persen. Jumlah UMK DIY hasil pencacahan sampel SE2016 tahun 2017 sebanyak 521 ribu usaha. Dilihat distribusinya jumlah UMK terbesar di Sleman dan Bantul, masing-masing 27 persen dan 28,6 persen. Sementara yang di Gunungkidul sebanyak 21,4 persen sedangkan terendah di Kota Yogyakarta dan Kulonprogo masing-masing sebanyak 12,8 persen dan 12,3 persen.

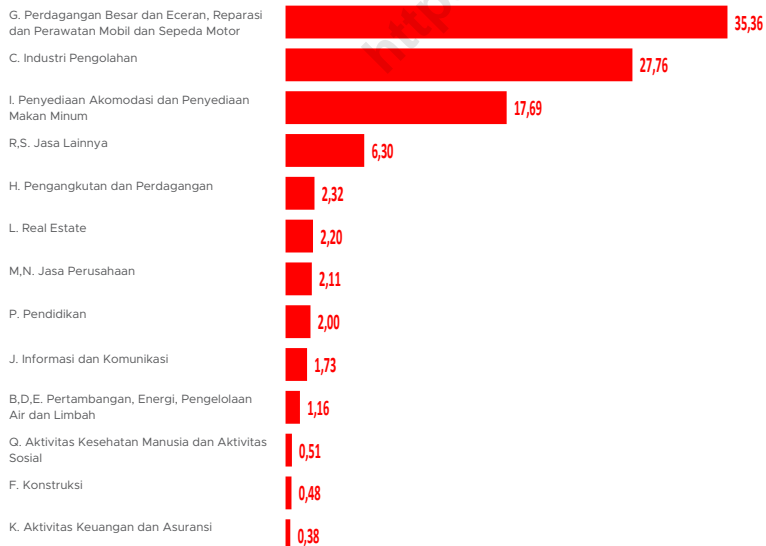
UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
D.I. YOGYAKARTA

Gambar 1
Persentase Jumlah UMK menurut Tahun Beroperasi, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 2
Persentase Jumlah UMK Menurut Kategori, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 1.
Jumlah dan Persentase UMK Menurut Kabupaten/Kota, 2017

Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Kulon Progo	64.054	12,29
Bantul	138.332	26,55
Gunungkidul	111.655	21,43
Sleman	140.395	26,95
Yogyakarta	66.575	12,78
D.I. Yogyakarta	521.011	100,00

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan



**UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA KERJA
TERBANYAK**

Bagian

2

<https://yogyakarta.bps.go.id>

Jumlah UMK yang sangat besar di DIY tentunya akan berperan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Berdasarkan data Sakernas 2017, pengangguran di DIY sebesar 3,02 persen, terbanyak pada lulusan Universitas yang mencapai lebih dari 6,0 persen. Masih tingginya kontribusi lulusan Universitas terhadap jumlah pengangguran di DIY, memberikan harapan bahwa UMK dapat menjadi ladang usaha. Pengangguran juga banyak terjadi pada lulusan SMA dan SMK yang masing-masing sebesar 4,4 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pengangguran di DIY adalah pengangguran terdidik, sehingga memberikan peluang cukup besar bahwa UMK menjadi ladang usaha inovasi dan kreativitas.

Pembekalan keterampilan bagi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke atas akan menjadi aksi yang sangat strategis agar mereka mampu menciptakan usaha sendiri. Data SE2016-Lanjutan memberikan informasi bahwa UMK telah menyerap sekitar 82,1 persen tenaga kerja nonpertanian di DIY.

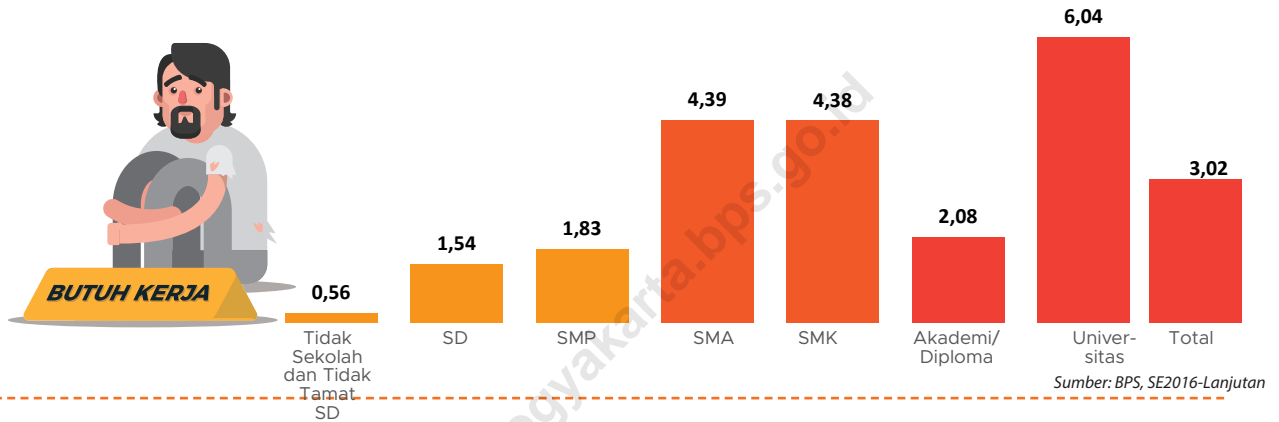
Penyerapan tenaga kerja UMK terjadi paling banyak pada usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (kategori G) mencapai

28,5 persen dari tenaga kerja pada UMK. Usaha Industri Pengolahan (Kategori C) dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) menempati urutan kedua dan ketiga dalam penyerapan tenaga kerja pada UMK, masing-masing sebesar 28,2 persen dan 16,3 persen.

Secara-rata-rata per usaha, UMK kategori Konstruksi (F) memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu sekitar 17 pekerja, diikuti kategori Pendidikan (P) sekitar 9 pekerja. Secara umum, rata-rata penyerapan tenaga kerja UMK di DIY sebesar 2 pekerja.

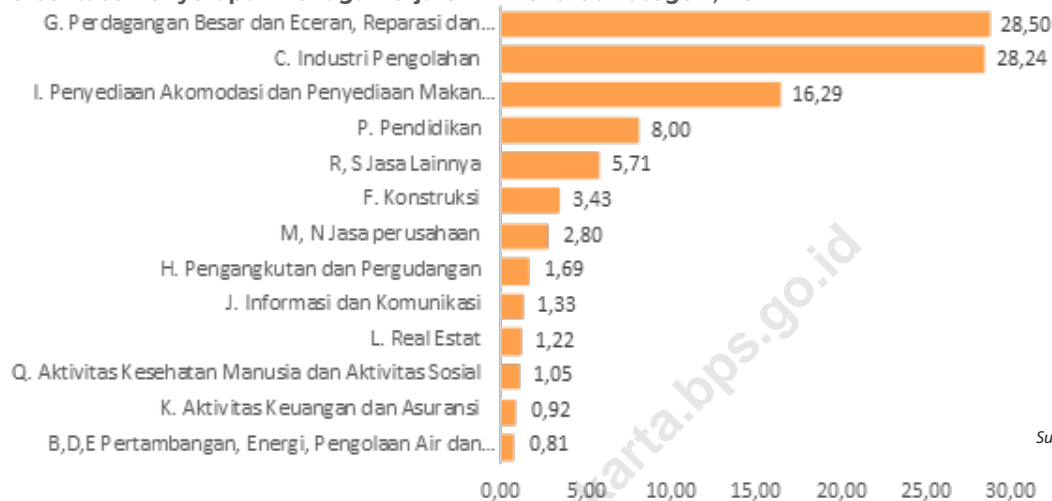
**UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA
KERJA
TERBANYAK**

Gambar 2
Tingkat Pengangguran D.I. Yogyakarta menurut Pendidikan, 2017



Gambar 3
Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Status Usaha, 2017



Gambar 4**Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UMK Menurut Kategori, 2017**

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 2.**Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Nonpertanian Menurut Kategori, 2016**

Kategori	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja
B,D,E Pertambangan, Energi, Pengolahan Air dan Limbah	6.039	9.999	2
C. Industri Pengolahan	144.698	346.730	2
F. Konstruksi	2.484	42.069	17
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	184.242	349.938	2
H. Pengangkutan dan Pergudangan	12.090	20.695	2
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	92.148	200.076	2
J. Informasi dan Komunikasi	8.989	16.369	2
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.987	11.313	6
L. Real Estat	11.442	15.037	1
M, N Jasa perusahaan	10.975	34.418	3
P. Pendidikan	10.415	98.283	9
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	2.662	12.914	5
R, S Jasa Lainnya	32.840	70.086	2
Jumlah	521.011	1.227.927	2

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**PENGELOLAAN
UMK
DILAKUKAN
SECARA
SEDERHANA**

Bagian

3



PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA

UMK di DIY memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMK. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dan UMK adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar untuk mendapatkan pembinaan, bantuan modal, maupun lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMK sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

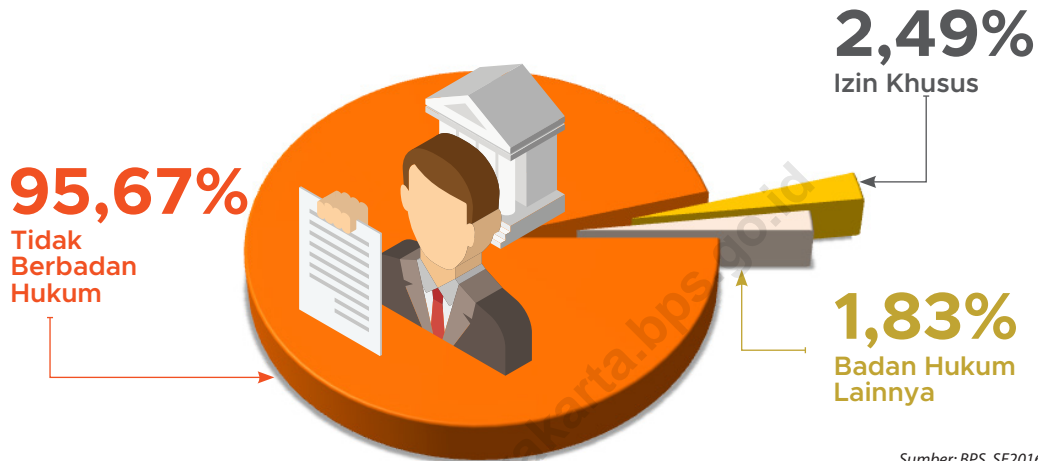
Pengelolaan UMK yang dilakukan secara sederhana tercermin dalam data SE2016 di antaranya dari variabel-variabel status badan hukum, pencatatan keuangan, dan penggunaan komputer. Di DIY, jumlah UMK yang tidak berbadan hukum masih sangat mendominasi yaitu mencapai 95,7 persen. Sebaliknya, usaha yang mempunyai ijin khusus hanya 2,5 persen dan yang memiliki badan hukum lainnya hanya 1,8 persen. Demikian pula dengan pencatatan keuangan usaha sangat jarang dilakukan oleh pelaku UMK. Hanya sekitar 5,2 persen dari UMK yang sudah mempunyai ijin khusus atau yang tidak berbadan hukum melakukan pencatatan laporan keuangan. Informasi lain

juga menjelaskan bahwa mayoritas UMK belum menggunakan komputer. Padahal, pemanfaatan komputer tidak terbatas hanya untuk melakukan laporan keuangan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendesain produk, pemasaran produk dan lain-lain yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah produk UMK. Data menunjukkan, UMK yang menggunakan computer hanya kurang dari 10 persen.

Untuk meningkatkan pendapatan UMK sekaligus meningkatkan daya saing produknya, kemitraan menjadi salah satu cara yang tepat. Namun demikian, usaha ini masih belum menjadi pilihan bagi UMK. Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Hanya sekitar 12,8 persen UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

Di antara sektor nonpertanian di DIY, UMK pada kategori D (Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin) yang pengelolaannya paling baik. Hal ini tercermin dari keunggulan dalam penggunaan computer, penggunaan internet dan menjalin kemitraan. UMK pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin tercatat mempunyai persentase tertinggi di antara kategori lainnya. Sementara dari aspek badan hukum, kategori Pendidikan persentasenya paling tinggi, setelah itu diikuti kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi.

Gambar 5
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Badan Hukum, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 6
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Internet dalam Usaha, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 7
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Komputer dalam Usaha, 2017



Gambar 8
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Keikutsertaan dalam Kemitraan, 2017



Tabel 3.
Persentase UMK yang Berbadan Usaha, Menggunakan Internet,
Menggunakan Komputer, dan Menjalin Kemitraan, 2017

Kategori	Berbadan Usaha	Menggunakan Komputer	Menggunakan Internet	Menjalin Kemitraan
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,20	7,29	6,83
C. Industri Pengolahan	1,97	4,92	13,19	14,29
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	16,48	100	100	32,42
E,F,G. Pengelolaan Air dan Limbah dan Konstruksi, dan Perdagangan	2,91	6,67	16,72	14,57
H. Pengangkutan dan pergudangan	4,14	7,25	19,63	14,97
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1,58	3,33	12,40	5,89
J. Informasi dan Komunikasi	3,94	32,30	57,15	16,29
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	67,14	76,09	48,16	22,04
L. Real Estat	0,90	3,47	9,60	1,15
M,N. Jasa Perusahaan	12,32	46,00	49,79	23,77
P. Pendidikan	68,13	75,40	73,36	27,86
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	52,03	35,16	45,19	21,90
R,S. Jasa Lainnya	1,80	11,28	26,45	8,51
Total	4,33	9,04	18,34	12,78

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan





**PELAKU
UMK
PERLU
MENINGKATKAN
KAPABILITAS**

Bagian

4

<https://yogyakarta.bps.go.id>

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan sistem manajemen pembagian tugas yang baik. Namun, sebagian besar UMK dilakukan secara perorangan. Oleh karena skala usaha yang kecil dan pengelolaannya dilakukan secara sederhana, maka seluruh proses usaha atau produksi sampai pemasaran dilakukan sendiri oleh pengelola atau pengusaha. Selain itu, masih banyak UMK yang dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar. Hasil data SE2016-Lanjutan menunjukkan sekitar 19,9 persen UMK dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar

Peranan UMK dalam menggerakkan perekonomian tidak terlepas dari peran perempuan baik sebagai pengusaha maupun tenaga kerja. Secara umum, persentase pengusaha UMK yang berjenis kelamin perempuan sekitar 47,7 persen. Meskipun masih sedikit lebih rendah dari laki-laki, namun persentase ini termasuk tinggi mengingat masih berlakunya stereotipe bahwa laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama. Berpijak dengan hal tersebut dapat diduga jika

UMK juga dijalankan sebagai penunjang perekonomian keluarga.

Secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK masih rendah. Lebih dari sepertiga pengelola berpendidikan SD ke bawah, seimbang dengan yang berpendidikan STLA. Masih rendahnya pendidikan pengelola UMK menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha ini seperti pelatihan-pelatihan.

**PELAKU
UMK
PERLU
MENINGKATKAN
KAPABILITAS**

Gambar 9
Persentase UMK Nonpertanian
Menurut Jumlah Tenaga Kerja, 2017

65,06%
Tetap dan Kontrak



Tidak Tetap/
Harian

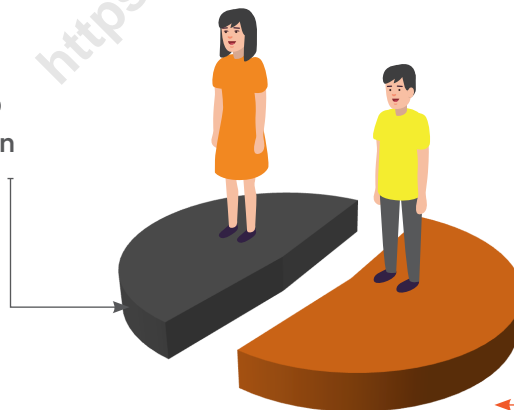
0,22%
Outsourcing

19,88%
Tidak dibayar

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 10
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Jenis Kelamin, 2017

48%
Perempuan



52%
Laki-Laki

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

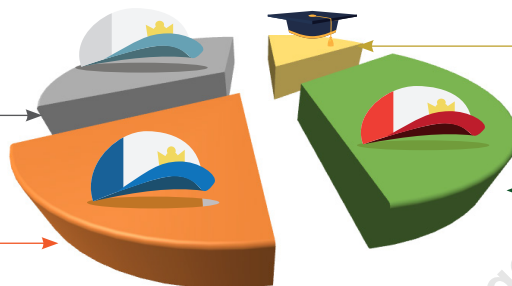
Gambar 11
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Pendidikan, 2017

33%

SLTA

19%

SLTP



14%

Perguruan Tinggi

34%

Sekolah Dasar

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 4.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Kategori dan Status Pekerja

Kategori	Tetap dan Kontrak	Tidak Tetap/Harian/ Outsourcing/Asing	Tidak Dibayar
B,D,E Pertambangan, Energi, Pengolahan Air dan Limbah	70,13	15,96	13,91
C. Industri Pengolahan	54,98	17,02	27,99
F. Konstruksi	71,22	3,20	25,58
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	58,95	20,62	20,43
H. Pengangkutan dan Pergudangan	23,36	76,64	0,00
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	69,61	8,35	22,04
J. Informasi dan Komunikasi	77,48	16,97	5,56
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	67,89	8,20	23,90
L. Real Estat	79,42	5,94	14,64
M, N Jasa perusahaan	63,73	27,96	8,31
P. Pendidikan	82,17	16,39	1,44
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	85,02	10,00	4,98
R, S Jasa Lainnya	68,21	19,89	11,90
Jumlah	65,06	15,06	19,88

**KINERJA
USAHA
DARI SISI
KEUANGAN**

Bagian

5

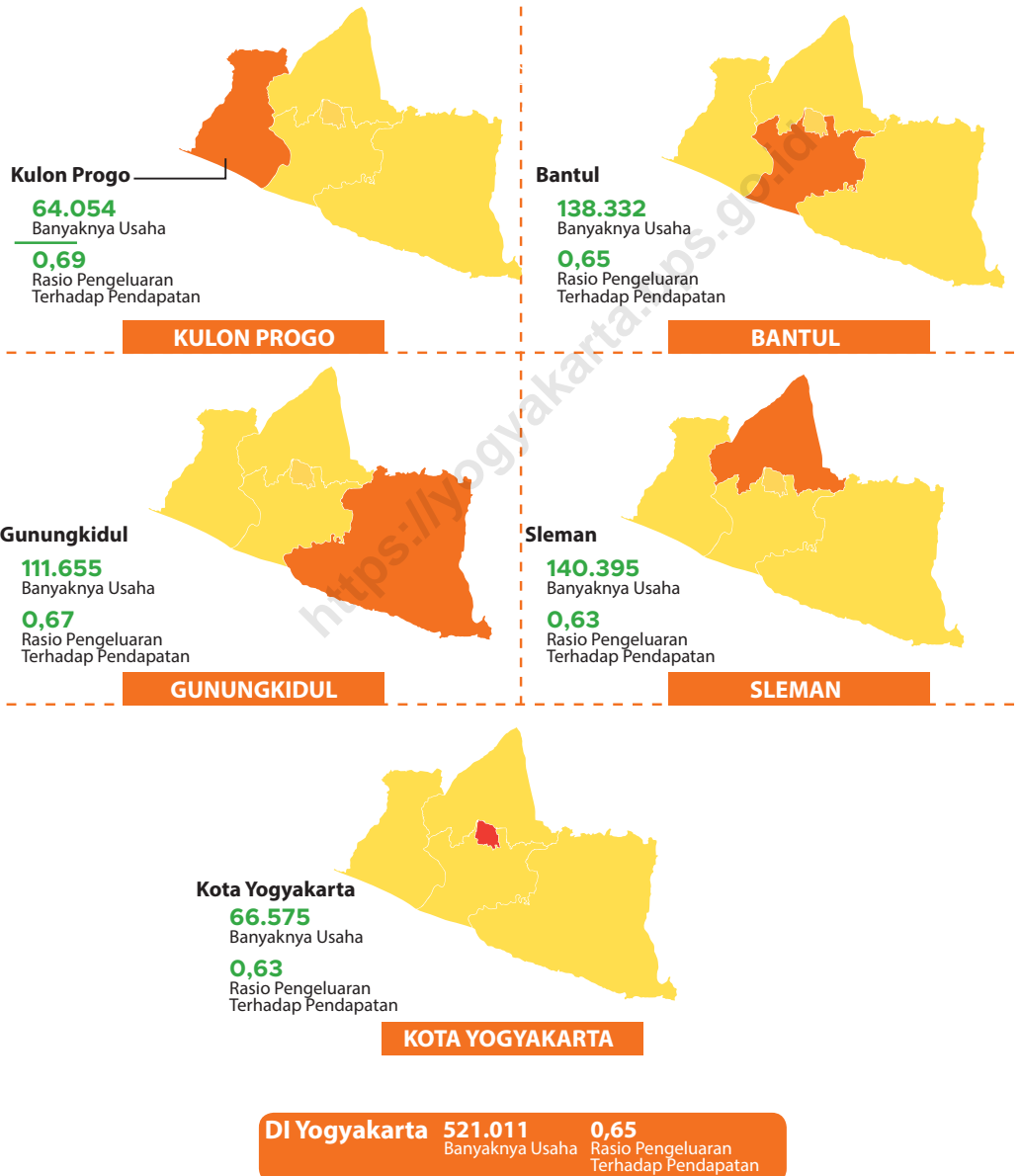
<https://yogyakarta.bps.go.id>

KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN

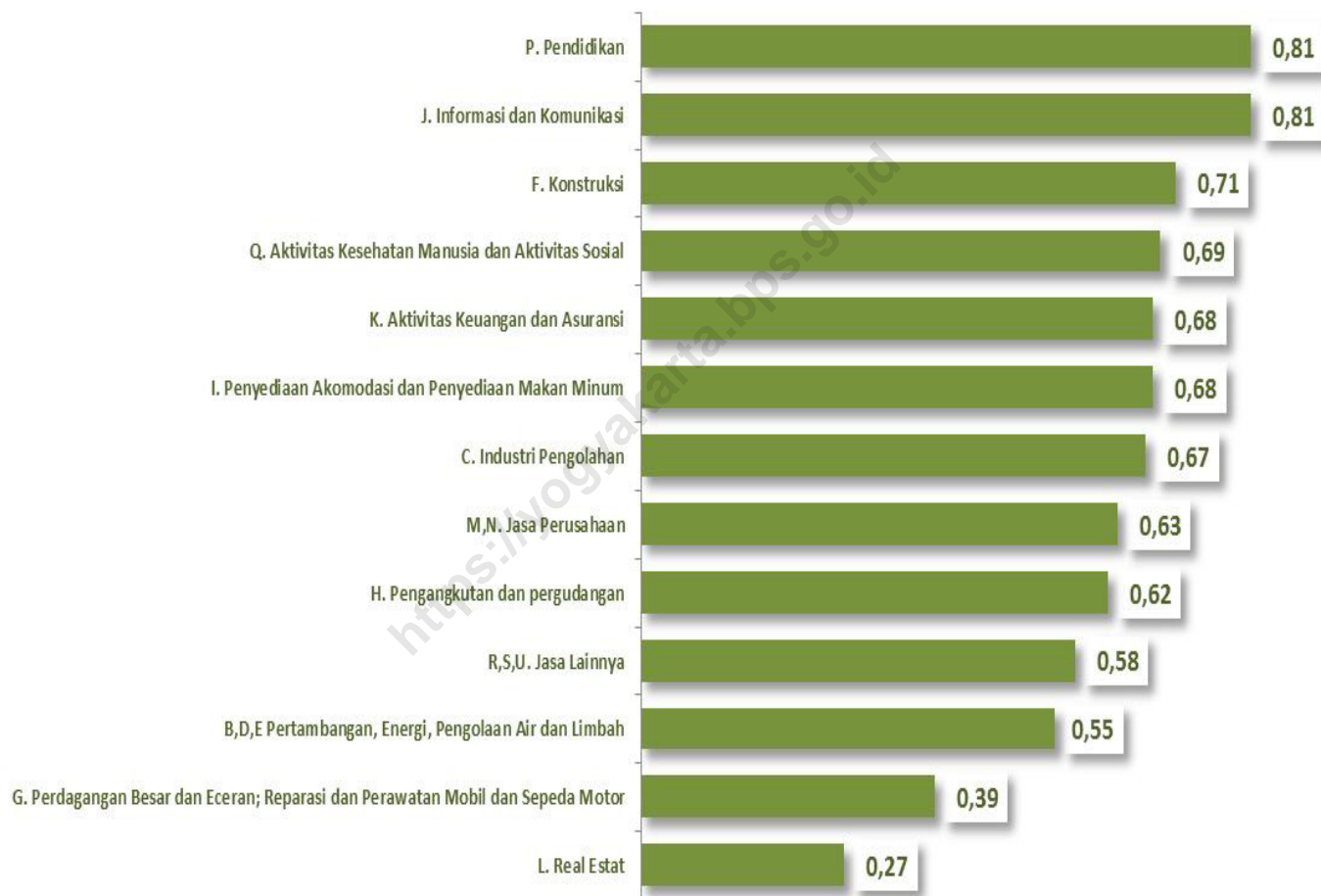
Kinerja usaha merupakan hasil dari kegiatan pemanfaatan sumber daya suatu usaha yang dapat diukur dengan beragam cara, salah satunya adalah laba usaha. Berdasarkan data hasil SE2016-Lanjutan, perolehan laba UMK menunjukkan capaian yang positif meskipun 25,11 persen pengusaha UMK mengaku mengalami penurunan laba.

Selain laba usaha, rasio pengeluaran terhadap pendapatan juga digunakan untuk melihat tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin baik atau semakin menguntungkan usaha tersebut. Kategori L (Real Estat) dan G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) merupakan kategori lapangan usaha yang paling menguntungkan dengan rasio sebesar 0,27 dan 0,39.

Gambar 15
Banyaknya Usaha/Perusahaan dan Rasio Pengeluaran terhadap
Pendapatan UMK Menurut Wilayah

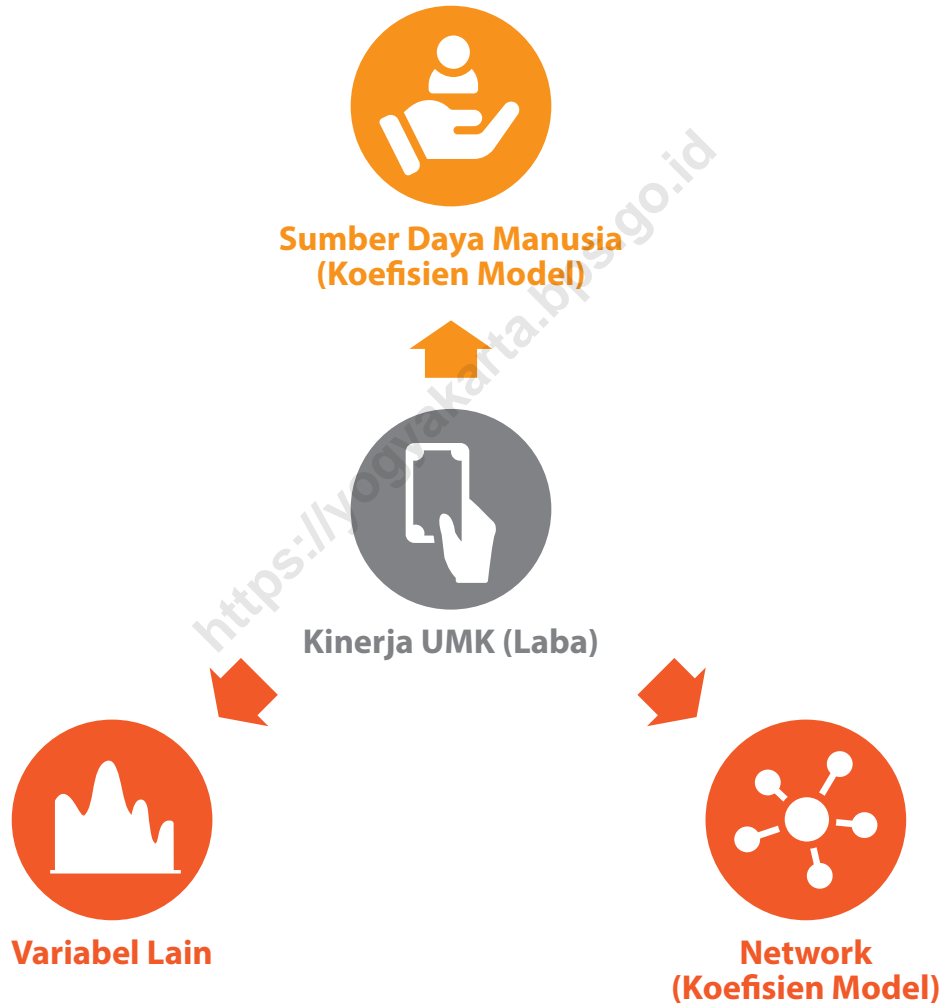


Gambar 16
Persentase UMK menurut Kondisi Laba 2016 dibanding 2015



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 17
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Usaha UMK






**PROSPEK
UMK DI
MASA
MENDATANG**

Bagian

6

<https://yogyakarta.bps.go.id>



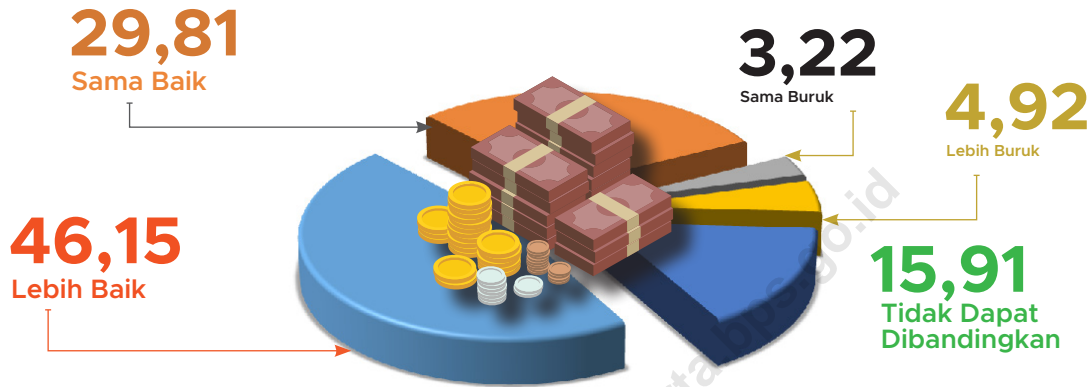
Selaras dengan RPJMN 2015-2019, RPJMD DIY 2017-2022 juga menargetkan adanya peningkatan usaha-usaha yang berpotensi tumbuh dan inovatif untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu usaha yang memiliki prospek bagus di masa mendatang. Dalam SE2016-Lanjutan, prospek adalah harapan atau kemungkinan dalam hal ini prospek berkaitan dengan kondisi usaha atau tendensi bisnis ke depan baik dari sisi perolehan keuntungan, atau omset. Pengusaha UMK di DIY cukup optimis dengan iklim usaha masa yang akan datang. Persentase mereka yang menyatakan bahwa usaha akan lebih baik atau sama baik pada tahun 2018 mencapai 76 persen.

Agar kondisi bisnis ke depan menjadi lebih baik, tentunya diperlukan upaya untuk mengurangi kendala yang dihadapi. Dua pertiga UMK di DIY memiliki kendala dalam menjalankan usaha. Adanya permasalahan permodalan/likuiditas dan pesaing merupakan kendala utama yang dihadapi. Masing-masing sekitar 49 persen dan 46 persen pengusaha UMK menyatakan memiliki kendala tersebut.



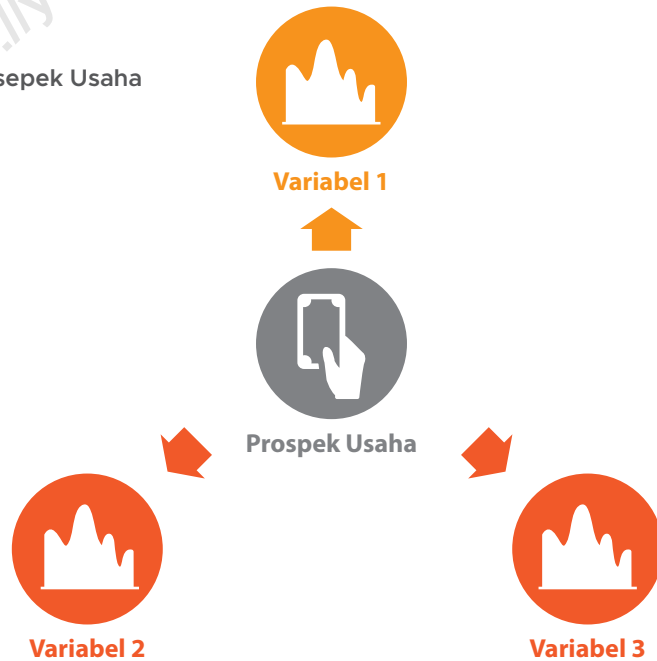
**PROSPEK
UMK DI MASA
MENDATANG**

Gambar 18.
Persentase UMK Menurut Prospek UMK Tahun 2018



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 19
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prospek Usaha





DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, 55183
Telp. 0274-4342234. Fax. 0274-4342230.

Homepage : <http://yogyakarta.bps.go.id> E-mail : pst3400@bps.go.id

ISBN 978-602-1392-74-4

